

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

- g. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan rencana kerja reformasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal Januari 2020

**Plt. Kepala Badan,**



5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Standar Satuan Harga	1 Penyusunan standar harga barang dan jasa keperluan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
6.	Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah	1 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Dokumen SK	2 Dokumen SK	2 Dokumen SK	2 Dokumen SK
			2 Penyusunan daftar Rencana Kebutuhan BMD	2 Dokumen SK	2 Dokumen SK	2 Dokumen SK	2 Dokumen SK
			3 Penyusunan SK Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan, Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu	4 Dokumen SK	4 Dokumen SK	4 Dokumen SK	4 Dokumen SK
			4 Penyusunan tim penilai terhadap aset yang belum bernilai wajar dan aset baru dicatat 5 Penyusunan tim penilai terhadap aset yang dimanfaatkan	1 Dokumen SK 6 Dokumen	1 Dokumen SK 6 Dokumen	1 Dokumen SK 6 Dokumen	1 Dokumen SK 6 Dokumen

Plt. Kepala Badan.



Drs. ROCHIM HIDAYAT  
Pembina  
NIP. 196408171994031008



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR : 800/ /BPKAD/2020**

**TANGGAL : JANUARI 2020**

No	Program/ Tahapan Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome/ Output	Indikator Target	Target			
				2019	2020	2021	2022
1.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang lebih berkualitas	Tersusunnya 7 jenis laporan keuangan yang berkualitas informative dan akuntabel sehingga menghasilkan Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan	7 Jenis Laporan Keuangan yang di tuangkan dalam LHP BPK	7 Jenis Laporan Keuangan yang di tuangkan dalam LHP BPK	7 Jenis Laporan Keuangan yang di tuangkan dalam LHP BPK	7 Jenis Laporan Keuangan yang di tuangkan dalam LHP BPK
2.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perda APBD, Perbup APBD, Perda Perubahan APBD, Perbup Perubahan APBD	Terbitnya 20 Jenis Perda, Perbup APBD Serta Perda dan Perbup Perubahan APBD	5 Jenis Peraturan APBD	5 Jenis Peraturan APBD	5 Jenis Peraturan APBD	5 Jenis Peraturan APBD
3.	Penatausahaan Keuangan	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SKPP, SPD	Terbitnya $\pm 21673$ SP2D Terbitnya $\pm 156$ SKPP Terbitnya $\pm 3428$ SPD	Terbitnya $\pm 21673$ SP2D Terbitnya $\pm 156$ SKPP Terbitnya $\pm 3428$ SPD	Terbitnya $\pm 21673$ SP2D Terbitnya $\pm 156$ SKPP Terbitnya $\pm 3428$ SPD	Terbitnya $\pm 21673$ SP2D Terbitnya $\pm 156$ SKPP Terbitnya $\pm 3428$ SPD	Terbitnya $\pm 21673$ SP2D Terbitnya $\pm 156$ SKPP Terbitnya $\pm 3428$ SPD
4.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Standar Satuan Harga	Penyusunan standar harga barang dan jasa keperluan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	2 PERBUP	2 PERBUP	2 SK Bupati	2 SK Bupati





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**Jalan. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun 74112**

Telp. (0532) 21412, 25317 Fax. (0532) 25233 Pos-el : [bpkad.kotawaringinbarat@gmail.com](mailto:bpkad.kotawaringinbarat@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**  
**DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR: 800/13 /BPKAD/2020**

**T E N T A N G**  
**RENCANA KERJA REFORMASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN**  
**ASET DAERAH TAHUN 2019-2022**

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka dipandang perlu melaksanakan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;

b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya rencana kerja reformasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Rencana Kerja Reformasi Inspektorat Tahun 2019-2022;

Mengingat

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik